

Understanding of Pancasila Ideology in Students of Makassar City Junior High School Education UNIT

Herman¹, Firman Umar², Muhammad Akbal³

Universitas Negeri Makassar^{1,2,3}

Email: herman7403@unm.ac.id

Abstract. The actualization of the Pancasila practice in Indonesia as the basis of the state, the state ideology and the nation's way of life in the life of the community, nation and state are still experiencing degradation, especially for students, including in this case the behavior in the daily lives of students, and their guidance. This study used a survey with a qualitative descriptive approach. The results of this study indicate the behavior of students who experience a shift when associated with Pancasila values. It is important to develop behavior in accordance with Pancasila values to shape the behavior and character of students in facing developments in the era of rapidly developing information and technology.

Keywords: Understanding the values of Pancasila, student behavior, fostering student attitudes and behavior.

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara dan pandangan hidup bangsa disahkan pada tanggal 18 agustus 1945 oleh panitia persiapan kemerdekaan indonesia (PPKI), nilai-nilainya telah ada pada bangsa indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara, yang berupa nilai-nilai istiadat, nilai-nilai religius, serta kebudayaan.

Nilai-nilai tersebut telah ada dan melekat serta teramalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup, pedoman hidup, penuntun sikap dan tingkah laku, sehingga materi pancasila yang berupa nilai-nilai tersebut adalah bersumber dari bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa. Dalam perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia pancasila sebagai dasar negara mengalami berbagai tantangan yang memberikan pengalaman positif bagi peningkatan pemahaman ideologi pancasila menuju tercapainya cita-cita yaitu negara yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur.

Secara konseptual, Pancasila merupakan ideologi tahan banting yang kian relevan dengan perkembangan kekinian. Namun, secara operasional terdapat jurang yang kian melebar antara idealitas Pancasila dan realitas pembumiannya. Jurang lebar antara idealitas dan realitas Pancasila itulah yang menjadi sumber krisis kebangsaan hari ini.

Kehidupan kebangsaan hari ini diliputi cuaca kebatinan dengan mega/mendung kerisauan, pertikaian, dan penggelapan. Sulit menemukan bintang penuntun yang menerbitkan kesamaan titik temu, titik tumpu, dan titik tuju. Visi kebangsaan ibarat cermin kebenaran yang jatuh dan pecah berkeping-keping. Setiap pihak hanya memungut satu kepingan lantas memandang kebenaran menurut bayangannya sendiri. Rasa saling percaya pudar; bhineka warna sulit menyatu, rasa sulit bersambung, rezeki sulit berbagi (Yudi Latif 2018;4).

Selanjutnya tendensi kemerosotan dalam nilai-nilai kebangsaan dan ketahanan ideologi bisa dilihat dari berbagai survei dan pengukuran. Indeks ketahanan nasional yang disusun Labkurtannas, Lembaga Ketahanan Nasional, mengindikasikan melemahnya ketahanan ideologi dan politik dalam kurun tujuh tahun terakhir (2010-2016). Indeks ketahanan ideologi (meliputi variabel toleransi, kesederajatan dalam hukum, kesamaan hak dalam kehidupan sosial, dan persatuan bangsa cenderung terus merosot dari skor 2,31 (pada 2010) menjadi 2,06 (pada 2016) (Yudi Latif 2018;222).

Gambaran yang sama diperlihatkan oleh hasil Survei Nilai-Nilai Kebangsaan (SNK) oleh BPS 2015 (survei pertama kali di Indonesia). Dari setiap 100 orang Indonesia, 18 orang bahkan tidak tahu judul lagu kebangsaan Republik Indonesia; 53 persen orang Indonesia tidak hafal seluruhnya lirik lagu kebangsaan; 24 dari setiap 100 orang Indonesia tidak hafal sila-sila Pancasila; 42 persen orang Indonesia terbiasa menggunakan barang bajakan; 55% orang Indonesia jarang bahkan tidak pernah ikut kerja bakti (Yudi Latif 2018;223).

Pada aspek pembangunan di bidang ekonomi, bangsa Indonesia saat ini mengalami tantangan yang cukup serius yang dapat menyebabkan terpuruknya sistem ekonomi bangsa akibat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga merugikan keuangan negara dan sekaligus melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Data penindakan kasus korupsi semester tahun 2018 yang dikeluarkan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yakni nilai rata-rata kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi per kasus pada tahun 2018, yakni Rp 7,8 miliar hal ini berbeda pada di dua tahun sebelumnya yakni, tahun 2016 rata-rata kerugian negara yang ditimbulkan per kasus yakni sebesar Rp 4,2 miliar. Sedangkan pada tahun 2017 rata-rata kerugian negara yang ditimbulkan per kasus sebesar Rp 6,7 miliar. Artinya, dari tren tersebut maka kerugian negara yang timbul per kasus cukup meningkat. (<https://www.antikorupsi.org>, diakses Kamis, 20 Desember 2018).

ICW juga merilis data tentang pemetaan kasus korupsi untuk semester 1 tahun 2018 dimana anggaran desa menjadi sektor yang paling rawan dikorupsi

dengan tren 27%, sektor pemerintah 24%, transportasi 13%, sektor pendidikan 12%, kesehatan 8%, pertanian 7%, perizinan 6%, pengairan 5%, sosial kemasyarakatan 5%, dan pemilu 4%. (<https://www.antikorupsi.org>, diakses Kamis, 20 Desember 2018).

Disisi lain perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia terus saja terjadi hasil rekapitulasi tindak pidana korupsi yang dirilis oleh KPK per 31 Mei 2018, KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian penyelidikan 76 perkara, penyidikan 85 perkara, penuntutan 50, inkracht 47 perkara, dan eksekusi 48 perkara. (<http://www.kpk.go.id/>, diakses Kamis, 20 Desember 2018).

Data tersebut di atas sebagai salah satu indikator yang menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi nasional belum diamankan secara utuh, sejalan dengan itu oleh presiden ke dua RI Soeharto kurang lebih 45 tahun yang lalu dalam sambutan peringatan ulang tahun UGAMA Yogyakarta mengemukakan bahwa Pancasila adalah milik kita. Kita telah memilikinya, tetapi baru merasa memilikinya, belum memahami atau menghayati apa yang sebenarnya Pancasila itu. Saya ingin mengajak untuk memikirkan bersama penghayatan dan penjabaran Pancasila, agar dapat dimengerti, diamankan, dan memberi wujud yang nyata dalam segala segi kehidupan dan tingkah laku kita sehari-hari berdasarkan Pancasila. (Suntjojo 1984: 10).

Presiden ke tiga BJ Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 mengemukakan bahwa salah satu faktor penyebab dilupakannya Pancasila di era reformasi ialah:

"... sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Semangat generasi reformasi untuk mengamalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, berimplikasi pada munculnya amnesia nasional" tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai grundnorm (norma dasar) yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga negara yang plural". (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/06/01/lm43df-ini-dia-pidato-lengkap-presiden-ketiga-ri-bj-habibie>).

Berdasarkan data tersebut, maka isu penelitian adalah masih lemahnya pengamalan Pancasila di Indonesia sebagai dasar negara, ideologi negara dan pandangan hidup bangsa belum teraktualisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari untuk itu menjadi daya dorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang pemahaman ideologi Pancasila bagi peserta didik di era 4.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kajian tentang pemahaman ideologi Pancasila pada peserta didik di kota Makassar, dalam beberapa jurnal hasil penelitian yang berhubungan dengan konsep tersebut antara lain:

1. Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila diambil dari jurnal ketahanan nasional diteliti oleh Septiana Dwiputri Maharani, Surono, Hadi Sutarmanto, dan Ahmad

Zubaidi tahun 2019 dalam penelitiannya mengukur tingkat ketahanan ideologi pancasila pada sembilan provinsi di Indonesia mengemukakan bahwa: daerah yang memiliki ketahanan kuat adalah Nusa Tenggara Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta; Sedang: Maluku, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara; Rendah yaitu Papua Barat dan DKI Jakarta.

2. Hasil penelitian Siswanto dalam jurnal politik tentang Transformasi Pancasila dan Identitas Keindonesiaan bahwa ideologi pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup semakin lama semakin ditinggalkan oleh bangsa Indonesia, pancasila sebagai rujukan politik dan sosial semakin melemah. Di lain pihak, globalisasi semakin lama semakin kuat mempengaruhi pola pikir dan perilaku bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia perlahan-lahan mulai kehilangan rujukan dalam perilaku politik dan perilaku sosialnya karena tercabut dari akar nilai-nilai dasar yang melandasi kehidupannya selama ini. Dalam situasi jauh dari referensi dasar kehidupan politik dan sosialnya ini, masyarakat Indonesia perlahan-lahan menuju kepada kondisi kehilangan identitas keindonesiaannya. Oleh karena itu, wacana transformasi pancasila ini diharapkan bisa menjadi solusi atas tantangan kebangsaan tersebut. Wacana transformasi ini diharapkan punya dampak strategis kepada pemerintah Indonesia dan masyarakat. Hal itu meliputi fakta dan konsekuensi:
 - a. Pemerintah Indonesia selama era Reformasi kurang menyadari bahwa pancasila adalah dasar negara dimana keberadaannya menentukan keberlanjutan NKRI kedepan.
 - b. Transformasi pengamalan pancasila diharapkan menyadarkan masyarakat bahwa pancasila merupakan pandangan hidup yang diwariskan oleh pendiri negara sehingga perlu menjadi referensi dalam menyikapi berbagai masalah. Transformasi pancasila seharusnya dilakukan dengan manajemen yang benar. Manajemen transformasi itu meliputi:
 - 1) transformasi bersifat menyeluruh atau holistik, tidak bisa bersifat parsial.
 - 2) Transformasi juga meliputi perubahan pola pikir masyarakat (*mindset*) transformasi ini juga perlu dilandasi oleh ilmu pengetahuan.
 - c. Hasil penelitian Zedi Muttaqin, Wahyun tentang pemahaman dan implementasi ideologi pancasila di kalangan generasi muda di desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima masih kurang. Hal ini terlihat dari belum terealisasi dengan baik rencana dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat serta masih banyaknya generasi muda yang tidak peduli tentang pengertian dan cara pengimplementasian ideologi pancasila di kalangan generasi muda.

Landasan Konseptual Teoritik

Pengertian ideologi

Istilah ideologi berasal dari kata '*idea*' yang berarti '*gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita*' dan '*logos*' yang berarti '*ilmu*'. Kata '*idea*' berasal dari kata bahasa Yunani '*eidōs*' yang artinya '*bentuk*'. Di samping itu ada kata '*idein*' yang

artinya '*melihat*'. Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide (*the science of ideas*), atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, '*idea*' disamakan artinya dengan '*cita-cita*'.

Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap, yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau faham. Memang pada hakikatnya antara dasar dan cita-cita itu sebenarnya dapat merupakan satu kesatuan. Dasar ditetapkan karena ada cita-cita yang mau dicapai. Sebaliknya, cita-cita ditetapkan berdasarkan atas suatu landasan, asas atau dasar yang telah ditetapkan pula. Dengan demikian ideologi mencakup pengertian tentang idea-idea, pengertian dasar, gagasan-gagasan dan cita-cita (Kaelan, 2013).

Apabila ditelusuri secara istilah ide pertama kali di pakai dan dikemukakan oleh seorang Perancis, *Destutt de Tracy*, pada tahun 1796. Seperti halnya *Leibnitz de Tracy* mempunyai cita-cita untuk membangun suatu sistem pengetahuan. Apabila Leibnitz menyebutkan impian-impian sebagai '*one great system of thurth*', dimana tergabung segala cabang ilmu dan segala kebenaran ilmu, maka *de Tracy* menyebutkan '*ideologie*', yaitu '*science of ideas*'; suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Perancis. Namun Napoleon mencemoohkannya sebagai suatu khayalan belaka, yang tidak mempunyai arti praktis. Hal semacam itu hanya impian belaka yang tidak akan menemukan kenyataan (Pranarka, 1987; Khaelan, 2013).

Perhatian kepada konsep ideologi menjadi berkembang lagi antara lain karena pengaruh Karl Marx. Ideologi menjadi vokabular penting di dalam pemikiran politik maupun ekonomi Karl Marx mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi.

Dalam arti ini, ideologi menjadi bagian dari apa yang disebutnya *Uberbau* atau *suprastruktur* (bangunan atas) yang didirikan di atas keuatan-kekuatan yang memiliki faktor-faktor produksi yang menentukan coraknya dan karena itu mencerminkan suatu pola ekonomi tertentu. Oleh karena itu kadar kebenarannya relatif, dan semata-mata hanya untuk golongan tertentu. Dengan demikian maka ideologi lalu merupakan keseluruhan ide yang reatif, karena itu mencerminkan kekuatan lapisan tertentu. (Kailan, 2013: 60-61)

Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antsipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar Pancasila namun mengeksplisitkan wawasannya secara kongkrit, sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah baru dan aktual.

Dalam ideologi terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar yang bersifat tetap dan tidak berubah, dan tidak langsung bersifat operasional, oleh karena itu setiap kali harus dieksplisitkan. Eksplisitasi dilakukan dengan menghadapkannya pandangan hidup berbagai masalah yang selalu silih berganti melalui refleksi yang rasional terungkap makna operasionalnya. Dengan demikian penjabaran ideologi dilaksanakan dengan interpretasi yang kritis dan rasional (Poepowardoyo, 1991; 59).

Sebagai suatu contoh ketrbukaan (pers Pancasila, dalam kaitannya dengan pendidikan, ekonomi, ilmu pengetahuan, hukum, kebudayaan dan bidang-bidang lainnya). Sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka maka Pancasila memiliki dimensi sebagai berikut:

Dimensi idealistis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila: *ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan*, maka dimensi idealistis Pancasila bersumber pada nilai-nilai filosofis yaitu filsafat Pancasila. Oleh karena itu dalam setiap ideologi bersumber pandangan hidup nilai-nilai filosofis (Pespowardoyo, 1991: 50). Kadar dan kualitas idealisme yang terkandung dalam ideologi Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme serta mampu menggugah motivasi yang dicita-citakan (Wibisono, 1989).

Dimensi normatif, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang memiliki kedudukan tertinggi dalam tertib hukum Indonesia. Dalam pengertian ini maka Pembukaan yang di dalamnya memuat Pancasila dalam alinea IV, berkedudukan sebagai '*staatsfundamentalnorm*' (pokok kaidah negara yang fundamental), agar mampu dijabarkan ke dalam langkah operasional perlu memiliki norma yang jelas (Poepowardoyo, 1991).

Dimensi realistik, suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu Pancasila selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal normatif, maka Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kaitannya bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak bersifat '*utopis*' yang hanya berisi ide-ide yang mengawang, namun bersifat realistik artinya mampu dijabarkan dalam kehidupan yang nyata dalam berbagai bidang.

Berdasarkan hakikat ideologi Pancasila yang bersifat terbuka yang memiliki tiga dimensi tersebut maka ideologi Pancasila tidak bersifat '*utopis*' yang hanya merupakan sistem ide-ide belaka yang jauh dari kenyataan hidup sehari-hari. Selain itu ideologi Pancasila bukan merupakan doktrin belaka, karena doktrin hanya memiliki pada ideologi yang hanya bersifat normatif dan tertutup, demikian pula ideologi Pancasila bukanlah merupakan ideologi pragmatis yang hanya menekankan segi praktis dan realistik belaka tanpa idealisme yang rasional. Maka ideologi Pancasila yang bersifat terbuka pada hakikatnya, nilai-nilai dasar (hakikat) sila-sila Pancasila

yang bersifat tetap adapun penjabaran dan realisasinya senantiasa dieksplisitkan secara dinamis, terbuka dan senantiasa mengikuti perkembangan jaman.

Keterbukaan ideologi Pancasila juga menyangkut keterbukaan dalam menerima budaya asing. Manusia pada hakikatnya selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu sebagai makhluk sosial senantiasa hidup bersama sehingga terjadilah akulturasi budaya. Oleh karena itu Pancasila sebagai ideologi terbuka senantiasa terbuka terhadap pengaruh budaya asing, namun nilai-nilai esensial Pancasila bersifat tetap. Dengan perkataan lain Pancasila menerima pengaruh budaya asing dengan ketentuan hakikat atau substansi Pancasila yaitu: *Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta keadilan* bersifat tetap.

Secara strategis keterbukaan Pancasila dalam menerima budaya asing dengan jalan menolak nilai-nilai yang bertentangan dengan *Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan* serta *keadilan* serta menerima nilai-nilai budaya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila tersebut. Demikianlah maka bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila sebagai bangsa yang berbudaya tidak menutup diri dalam pergaulan budaya antar bangsa di dunia. Hal ini bukan saja merupakan kebijaksanaan kultural namun secara filosofis nilai-nilai budaya yang ada pada bangsa Indonesia sebagai *kausa materialis* Pancasila yang memiliki sifat terbuka. Misalnya masuknya budaya India, Islam, Barat, dan sebagainya (Kaelan, 2013:67-70)

Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat . Apabila dikaji dari perspektif sosiologis yang membentuk pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai berikut:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib.
2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang.
3. Sila Persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri.
4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan.
5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan.

Sumber Politik Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Unsur-unsur politik yang membentyk pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antarumat beragama.
2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
3. Sila Persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai.
4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting.
5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*) untuk memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi.

Tantangan Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Unsur-unsur yang memengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut:

1. Pertarungan ideologis antara negara-negara *super power* antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara *super power*.
2. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi.
3. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat penambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkritnya adalah kerusakan lingkungan, seperti banjir, kebakaran hutan.

Adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan.
2. Penyalahgunaan kekuasaan (korupsi) mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis.

Urgensi Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral

- ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya.
2. ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan nilai toleransi berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan.

KESIMPULAN

1. Perkembangan dinamika sosial kemasyarakatan, termasuk perkembangan sumber-sumber informasi dan teknologi menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi negara mengalami pergeseran pemahaman di lingkungan masyarakat, kaitannya dalam hal ini, adalah peserta didik tingkat sekolah menengah pertama (SMP) di kota Makassar. Guru mengidentifikasi perubahan pola dan tingkah laku para siswa dipengaruhi oleh lingkungan sosial kemasyarakatannya, dan sumber-sumber informasi yang pada saat ini mudah dan efisien untuk didapatkan, dengan ditunjang oleh perkembangan teknologi yang pesat dan mudah didapatkan.
2. Praksis pola dan tingkah laku pengamalan pancasila di Indonesia sebagai dasar negara, ideologi negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terus mengalami perubahan, terutama bagi peserta didik, termasuk dalam hal ini adalah perilaku dalam kehidupan sehari-hari para siswa dalam lingkungan sekolah.
3. Pola pembinaan yang selama ini dilakukan, baik dalam bentuk pengajaran dan pendidikan di kelas memerlukan langkah-langkah yang dapat mengikuti perkembangan dinamika sosial kemasyarakatan, sumber-sumber informasi yang semakin mudah untuk di akses oleh para siswa, termasuk dalam hal ini penggunaan media teknologi yang ada. Pembinaan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila penting dilakukan untuk membentuk perilaku dan karakter siswa-siswi dalam menghadapi perkembangan di era arus informasi dan teknologi yang berkembang pesat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji Samekto dkk. *Pancasila Dialektika dan Masa Depan Bangsa*. Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. 2019.
- Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- _____. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2016.
- Kaelan. *Negara Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma. 2013.
- Poespowardojo, Soeryanto. *Pancasila Sebagai Ideologi ditinjau dari Segi Pandangan Hidup bersama, Dalam Pancasila Sebagai Ideologi*, BP-7, Pusat, Jakarta.1991

- Suntjojo. *P-4 dan UUD 1945 Dalam Bagan Bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*. Jakarta: CV.Indiana Jakarta. 1984.
- Syaiful Arif. *Falsafah Kebudayaan Pancasila Nilai dan Kontradiksi Sosialnya*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka. 2016.
- Wibisono, Siswomihardjo. *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka, Makalah pada Lokakarya Dosen-Dosen Pancasila di PTN dan PTS se Kopertis Wilayah V, Yogyakarta*.1989.
- Yudi Latif. *Wawasan Pancasila*. Jakarta: Mizan Anggota IKAPI. 2018.
- Budiatry, A. P. (2017). Dikotomi Identitas Keindonesiaan dan Kepapuaan Pasca Orde Baru. *Jurnal Penelitian Politik*, 14(1), 1-15.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (Diambil dari <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=196000&level=2>. Diakses tanggal 8 Februari 2020).
- Muttaqin, Z., Wahun. (2019). Pemahaman dn Implementasi Ideologi Pancasila di Kalangan Generasi Muda. *Jurnal Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian*, 7(2), 27-35.
- Zubaidi, A., & Sutarmanto, H. (2019). Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(2), 277-294.